

RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

KECAMATAN ILE BOLENG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Camat Ile Boleng khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Camat Ile Boleng pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul / saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Camat Ile Boleng di masa mendatang sangat kami harapkan.

Halaman i

DAFTAR ISI

		TAR	j
DAFTAR IS	SI		ii
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	5
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAM	IBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ILE BOLENG	11
DI II	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Boleng	11
	2.2	Sumber Daya Kantor Camat Ile Boleng	15
	2.3	Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Boleng	20
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Kantor Camat Ile Boleng	26
BAB III	PER	MASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	28
DAD III	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
	3.2	Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJ	UAN DAN SASARAN	31
BAB V	STR	ATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI	REN	ICANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII	KIN	ERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAR VIII	PEN	UTUP	53

DAFTAR ISI

KATA PEN	IGAN	TAR	
DAFTAR I	SI		i
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	5
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAN	MBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ILE BOLENG	11
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Boleng	11
	2.2	Sumber Daya Kantor Camat Ile Boleng	15
	2.3	Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Boleng	20
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Kantor Camat Ile Boleng	26
BAB III	PER	MASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	28
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
	3.2	Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJ	UAN DAN SASARAN	31
BAB V	STR	ATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI	REN	ICANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII	KIN	ERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAR VIII	PEN	UTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan periode ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berkahir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berkahir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan eifisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran,program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifatindikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 telah selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Flores Timur yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur Kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam *hal pelayanan publik*, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Ile Boleng dalam kurun waktu Tahun 2018-2022. Oleh karena itu,dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Boleng untuk 4 (empat) tahun kedepan.Secara operasional Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

- Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

- Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
- Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ile Boleng.

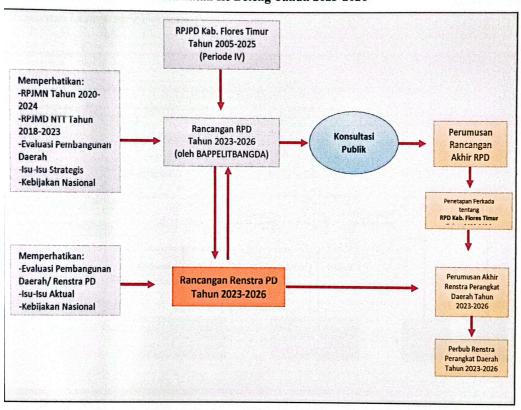
Alur Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar 1 berikut

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Pembangunan Daerah

Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Rangkaian proses penyusunan Renstra di atas menunjukkan bahwa Renstra Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, berdasarkan

kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, dan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional

Hubungan Antar Dokumen

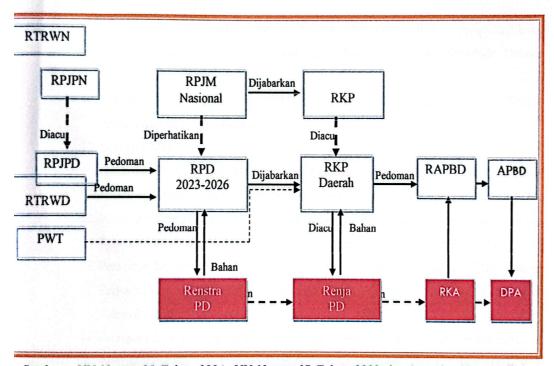
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan yang memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Rentra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan Renstra Kecamatan Ile BolengKabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD, RPA serta DPA Tahun 2023-2026.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Ile BolengKabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen pengangaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2.

Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ile Boleng adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ile Boleng 2023-2026 adalah:

- Sebagai Dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Ile Boleng periode tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan.
- Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan strategis Kecamatan secara akuntabel dan transparan.

2. Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Ile Boleng 2023-2026 adalah:

- Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para Camat;
- Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh Sumber Daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
- 3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Ile Boleng yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,

- 4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikatorindikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Ile Boleng adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsiRenstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra PerangkatDaerah dengan RPD dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, PeraturanDaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedomanyang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RenstraPerangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ILE BOLENG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apasaja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perludiatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Boleng

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Kantor Camat Ile Boleng

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Boleng

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Ile Boleng

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, danhasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB. III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota:
- 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya,maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Boleng

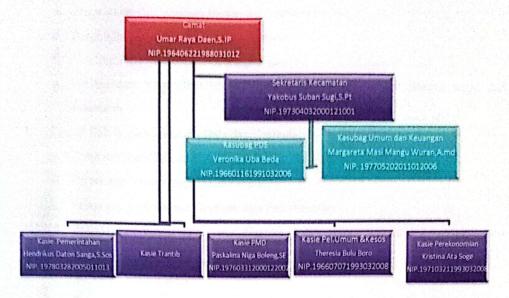
Kecamatan Ile Boleng, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Ile Boleng dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Flores Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 11. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Boleng



Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

1. Fungsi Camat:

- a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan program dan anggaran;
- Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian:
 - a. Penataausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;

- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Fungsi Kasi Pemerintahan:

- Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..
- 8. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial:
 - a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosjal:

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 9. Fungsi Kasi Perekonomian:
 - a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ile Boleng

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Ile Boleng berjumlah 23 orang terdiri seorang Camat, seorang Sekretaris, 5 Kepala Seksi dan 2 Kepala Sub Bagian, 7 orang Fungsional Umum dan dibantu oleh 7 orang Tenaga Teknis Perkantoran (Honorer). Jumlah pegawai Kantor Camat Ile Boleng berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 : Jumlah PNS Kantor Camat Ile Boleng berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO JABATAN		ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUM	LAH	8 orang	

Sumber: Kantor Camat Ile Boleng Tahun 2022.

Bardasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Staf yang menduduki Jabatan dilihat dari Eselon sudah lengkap. Yaitu Seorang Camat, sekretaris, 5 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Sub Bagian Penatausaan.

Tabel 2.2.2 :
Jumlah PNS Kantor Camat Ile Boleng Berdasarkan Pangkat Gol./Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina	IV/a	2 orang
2	Penata Tk.I	III/d	2 orang
3	Penata	III/c	2 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	2 orang
5	Penata Muda	III/a	1 orang
6	Pengatur Tk.I	II/d	6 orang
7	Pengatur	II/c	lorang
8	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1 orang
JUM	LAH	,	17 orang

(Sumber: Kantor Camat Ile Boleng Tahun 2022.)

Bardasarkan Tabel 2.2.2 di atas dapat dilihat bahwa ASN PNS Kecamatan Ile Boleng adalah sebanyak 17 orang yang dalam menjalan tugas dan fungsinya masing-masing dengan dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga terknis perkantoran (Honorer).

Tabel 2.2.3:

Jumlah PNS Kantor Camat Ile Boleng Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	4 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	•
5.	SLTA	12 orang
JUM	LAH	17 Orang

Sumber: Kantor Camat Ile Boleng Tahun 2022.

Bardasarkan Tabel 2.2.3 di atas dapat dilihat bahwa Staf Kecamatan Ile Boleng sebanyak 4 orang berpendidikan Sarjana dan, 1 orang merupakan Ahli Madya dan sisanya mengenyam Pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Sehingga perlu adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa pelatihan maupun tugas belajar kepada Staf untuk menambah wawasan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan yang maksimal.

Tabel 2.2.4 :
Jumlah PNS Kantor Camat Ile Boleng Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
JUN	ILAH	

Sumber: Kantor Camat Ile Boleng Tahun 2022.

Bardasarkan Tabel 2.2.4 di atas dilihat bahwa Penjabat maupun Staf Kecamatan Ile Boleng belum mengikuti PIM.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai di Kantor Camat Ile Boleng adalah:

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Ile Boleng

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jih	Satua
1	Tanah	Tanah	20.000	M2
2	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
		Rumah Dinas Camat	1	Unit
2	Kendaraan Operasional	Sepeda Motor	7	Unit
3	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meja Kerja Kayu	6	Buah
		Lemari Kayu	9	Buah
		Meja Kerja Kayu	18	Buah
		Meja Rapat	4	Buah
		Sofa	3	Unit
7		Lap Top	4	Unit
		Printer	4	Unit
		Meja 1/2 Biro	2	Buah
1		Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
1	- Carlos - C	Handy Cam	1	Buah
		Note Book	2	Unit
+		Overhead Projector	1	Unit
1		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit
1		peeralatan antena shf/parabola	1	Unit
+		Kasur/Spring Bed	1	Unit
		Bangku Tunggu	2	Buah
+		A.C. Window	2	Buah
	F	.C Unit	2	Unit
	J	am Mekanis	2	Buah
	G	ambar Presiden/Wakil Presiden	2	Buah
	T	iang Bendera	1	Buah
	W	hite Board	1 1	Lembar
	Kı	ırsi Fiber Glas/Plastik	10 1	Buah
	Kı	ırsi Kerja Pejabat Eselon IV	5 I	Buah

Dari tabel 2.2.5 di atas dapat dilihat bahwa ada 7 unit Sepeda Motor untuk menunjang kelancaran Operasional Kecamatan dalam keadaan baik. Untuk bangunan gedung kantor camat membutuhkan sebuah aula dalam rangka menampung peserta rapat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan Musrenbang Kecamatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ile Boleng

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ile Boleng dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu;

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran;
- Meningkatnya Sumber Daya Aparatur; dan
- 4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Ile Boleng dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Ile Boleng selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM.
 - b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Ile Boleng setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
 - c. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Ile Boleng setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.
- 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Ile Boleng dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas, dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan
 Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Ile Boleng di Bidang Pemerintahan tercermin dari :
 - a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa
- 4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
 - a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada masyarakat.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ile Bolengdapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja sesual Tugas dan Fungsi PD	Targ	Target Renstra SKPD Tahun ke-				alisasi Cap	alan Tahun	ke-	Rasio Capalan pada Tahun ke-				
	of animal tradephysical particles are a second record	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1		3	4	5	-	7		9	10	11	12	13	14	
•	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,009	
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,009	
3	Persentase ASN yang memiliki kesesualan kompetensi (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
•	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,009	

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Ile Boleng

Uraian		Anggaran pad	la Tahun ke-		Real	isasi Anggara	n pada Tahu	n ke-	Rasio ar	ntara Real	isasi dan A	Anggaran	Rata	-rata
Uraian	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(12)	(13)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	900.000	900.000	810.000	1.050.000	900.000	900.000	810.000	100,00%	100,00	% 100,00	% 100,00%	6 -8,109	-8,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	9.000.000	9.000.000	12.000.000	9.500.000	8.920.000	9.000.000	12.000.000	9.500.000	99,11%	100,00	100,009	100,00%	6 4,17%	6 4,479
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.376.000	2.800.000	2.800.000	2.400.000	1.376.000	574.000	1.400.000	2.400.000	100,00%	20,509	50,009	100,00%	29,73%	52,359
Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional	11.500.000	14.000.000	7.500.000	4.603.335	11.500.000	14.000.000	7.500.000	4.603.335	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-21,10%	-21,10%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	21.400.000	21.400.000	26.400.000	24.840.000	21.400.000	21.400.000	26.400.000	24.840.000	100,00%	100.00%	100,00%	100,00%	5.82%	5,82%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	856.000	602.000	1.191.000	-	856.000	602.000	1.191.000		100,00%	100.00%	100,00%	0.00%	-10.61%	-10,61%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.323.000	20.139.000	8.000.500	12.859.000	13.323.000	20.139.000	8.000.500	12.859.000	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%	17.20%	17,20%
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.000.000	13.200.000	10.500.000	15.000.000	9.000.000	13.200.000	10.500.000	15.000.000	100,00%	100.00%	100,00%	100.00%	23,02%	23,02%
Penyediaan Komponen instalasi Iistrik/Penerangan bangunan kantor	1.164.000	2.256.000	1.000.000	-	1.164.000	2.256.000	1.000.000			100,00%	100,00%	0,00%	-20,62%	-20,62%
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor		46.800.000			Section .	46.684.000		7.	0,00%	99,75%	0.00%	0,00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Bahan Bacaan							New York				5,2675	0,00%	0,00,0	0,0076
Penyediaan Makanan dan Minuman	18.500.000	18.000.000	10.000.000	6.000.000	18.475.000	18.000.000	10.000.000	6.000.000	99,86%	100,00%	100,00%	100.00%	-29.05%	-29,01%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	103.431.000	134.322.000	83.600.000	37.480.000	103.431.000	107.995.000	83.600.000	37.480.000	100,00%	80,40%	100,00%	100,00%	-21,02%	-24,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perkantoran	55.200.000	96.000.000	96.600.000	80.500.000	55.200.000	96.000.000	96.600.000	79.450.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,70%	19,29%	18,93%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										200,00%	100,0076	30,7070	13,23/6	10,55%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional		-	-									-		-
Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	23.000.000	4.000.000	-		22.865.000	4.000.000		e of the sale.	99,41%	100.00%	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	31.800.000	46.800.000	0	0	31.628.000	46.684.000	o	0	99,46%	99,75%	0,00%	0.00%	0.00%	
Pengadaan peralatan gedung kantor/ mebel	16.100.000	12.600.000	0	0	15.911.000	12.430.000	0	0	98,83%	98,65%	0,00%	0.00%		0,00%
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	17.500.000	10.000.000	6.000.000	12.444.000	17.500.000		6.000.000	12,444,000	100,00%	100,00%	100,00%	100.00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1.100.000	1.100.000	2.000.000	0		Park of a feet	2.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-6,06%	8,18% -6,06%

Uraian	And the second second second second	Anggaran pa	da Tahun ke-		Real	sasi Anggara	n pada Tahu	n ke-	Rasio ar	itara Reali	sasi dan A	070000	7-4-	-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	Salara Salara Salara	MANUAL COLUMN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			2021	Anggaran	,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ETT-E-MATCH						======	[9]	[20]	(11)	(12)	(13)	(22)	(13)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capalan Kinerja dan Keuangan	1													
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	13.371.500	25.000.000	0	0	13.371.500	24.993.500	0,00%	0.00%	100,00%	99,97%	0.00%	0,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													0,000	0,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	0	0	13.150.000	26.855.000	o	o	13.150.000	25.630.000	0,00%	0,00%	100,00%	99,16%	0,00%	0,70%
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	7.200.000	6.600.000	15.350.000	21.540.000	7.200.000	6.600.000	15.350.000	21.430.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,49%	54,36%	54,62%
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	,													
Peningkatan efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan														
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum														
Pelaksanaan tugas forkompincam	18.000.000	18.000.000	70.400.000	51.600.000	18.000.000	18.000.000	47.850.000	49.350.000	100,00%	100,00%	67,97%	95,64%	88,14%	56,12%
Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarat (PPKM)														
Pembinaan penanganan covid -19 di tingkat desa dan kelurahan	0	0	0	21.000.000	0	0	0	21.000.000		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	360.500.000	478.519.000	380.763.000	352.431.335	359 899 000	449 564 000	356 813 000	249 790 935	99.83%	93,95%	93,71%	98.97%	0,00%	#DIV/OI

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Ile Boleng

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Governent menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; yang meliputi:

- Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
- 3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- 6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
- Pelayanan admnistrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
- Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimantaatkan, meliputi :

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
- Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
- 7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
- 8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
- 9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

lsu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar, dan sebaliknya suatu kondisi/peluang yang apabila dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu strategis Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, yang sinergi dengan isu golobal, nasional dan daerah sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, isu strategis Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah;

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Belum diterapkannya standar operasional pelayanan (SOP) di lingkungan pemerintah daerah Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan
		Rendahnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan belum berkualitas (Target dan Saran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu

Hal.28

Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Aset Desa belum tertata secara baik
	Kualitas SDM Aparatur Desa yang terbatas
	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra 2023-2026 Kantor Kecamatan Ile Boleng, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut:

- 1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan; dan
- Rendahnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal.30

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu yang hendak dicapai; tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah dan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi serta memperhatikan kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada Kecamatan Ile Boleng adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Kecamatan Ile BolengKabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	100	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD Kantor Camat Ile Boleng periode tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan di atas, diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public	Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	 Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Ile Boleng.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Kantor Kecamatan Ile Boleng akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Ile Boleng.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Kantor Kecamatan Ile Boleng akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut.

		KOD	E				Target	Kinerja Program d	lan Kerang	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2023		2024
				SI			Target	Rp	Target	Rp
N-	Water and	1	de Nation Co	. S. V. 19	2	3	5	6	7	8
7-1	0-0	0-0								
7-1	0-0				Kecamatan Ile Boleng			1.856.212.964		1.865.366.813
7-1	0-0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		1.626.096.450		1.620.894.979
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		1.626.096.450		1.620.894.979
y					Party and St. Cont.	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)				
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)				
7-1	0-0	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)		65.000.000		65.000.000
7-1	0-0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dok)	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
7-1	0-0	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2 dok	7.500.000	2 dok	7.500.000
7-1	0-0	01	2.01	06		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (lap)		30.000.000		30.000.000
7-1	0-0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4 Lap.	17.500.000	5 dok	17.500.000
7-1	0-0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.232.196.020		1.232.196.020
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	17 orang	1.198.136.020	17 orang	1.198.136.020

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.1 dari 18

		KOD	E				Target	Kinerja Program o	lan Kerangi	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2023		2024
		ъ.	×	SU			Target	Rp	Target	Rp
		1			2	3	5	6	7	8
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 dok	24.060.000	4 dok	24.060.000
7-1	0-0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (lap)	5 Lap.	10.000.000	5 Lap.	10.000.000
7-1	0-0	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000		5.000.000
7-1	0-0	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan lapporan barang milik daerah pada SKPD (lap)	2 Lap.	5.000.000	2Lap.	5.000.000
7-1	0-0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7-1	0-0	01	2.05	09	dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)				
7-1	0-0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		133.700.000		133.700.000
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000
7-1	0-0	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka (paket)	10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	12.000.000	2Paket	12.000.000

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.2 dari 18

		KODI					Target	Kinerja Program d	lan Kerangl	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2023		2024
				S			Target 5	Rp 6	Target	Rp 8
7-1	0-0	01	2.06	05	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1 paket	10.800.000		10.800.000
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undngan yang disediakan (dok)	12 Dok.	900.000	12 Dok.	900.000
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah lap fasilitasi kunjungan tamu (lap)	12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.000.000
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)	12 Lap.	50.000.000	12 Lap	50.000.000
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah			88.399.833		83.198.362
7-1	0-0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan	jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (unit)	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000
7-1	0-0	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000
7-1	0-0	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				
7-1	0-0	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000
7-1	0-0	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor /bangunan lainya	jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3 Unit	28.399.833	3 Unit	23.198.362
7-1	0-0	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pedukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)		78.800.597		78.800.597

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.3 dari 18

		KODI	3				Target	Kinerja Program o	lan Kerang	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2023		2024
		Ь	×	SUB			Target	Rp	Target	Rp
		1			2	3	5	6	7	8
7-1	0-0	01	2.08	01		jumlh laporan penyediaa jasa surat menyurat (lap)	12 Lap	1.600.000	12 Lap.	1.600.000
7-1	0-0	01	2.08	02		jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (lap)	4 Lap.	10.000.597	4 Lap.	10.000.597
7-1	0-0	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (lap)	12 Lap	67.200.000	12 Lap	67.200.000
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)		23.000.000		23.000.000
7-1	0-0	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kondaraan Dinas Operasional atau	jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	8 Unit	5.000.000	8 Unit	5.000.000
7-1	0-0	01	2.09	06	Domoliharaan peralatan dan mesin	jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)				
7-1	0-0	01	2.09	08		jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	200			
7-1	0-0	01	2.09	09	Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	13.000.000	1 unit	13.000.000
7-1	0-0	01	2.09	10	Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit		1 unit	
7-1	0-0	01	2.09	11	Prasarana Pendukung Gedung Kantor	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
7	01				Kecamatan			230.116.514		244.471.834
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		63.062.886		70.153.292

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.4 dari 18

		KOD	E				Target	Kinerja Program (ian Kerang	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2023		2024
		1		S	2	3	Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan		<u> </u>		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	4 Dok.	63.062.886	4 Dok.	70.153.292
7	01	03			Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi /%		14.885.779		15.085.862
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					-
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)	12 Dok	14.885.779	12 Dok	15.085.862
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%				
7	01	05	2.01		Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			68.220.486		78.766.238
7	01	05	2.01		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (laporan)	12 Dok.	68.220.486	12 Dok.	78.766.238
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)				
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			83.947.363		80.466.442

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.5 dari 18

		K	ODE					Target	Kinerja Program o	lan Keranal	ra Pandanaan
URUSAN	BIDANG URUSAN	DDOCDAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2023		2024
\$4.5°		6-1	1			2		Target	Rp	Target	Rp
							James de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l	5	6	7	8
7	01		06	2.01	01	Faslitasi Penyusunanan peraturan desa dan peratuaran kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	10 Dok.	15.000.000	10 Dok.	25.000.000
7	01		06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	21 Dok	15.000.000	21 Dok	25.000.000
7	01		06	2.01	06		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)	3 Dok.	23.947.363		
7	01		06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.466.442

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.6 dari 18

		KOD	E				Targe	et Kinerja Program	dan Kerang	gka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2025		2026
		1		S	2	3	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12
7-1	0-0				2	3	9	10	11	12
7-1	0-0		12.00	1 73	Kecamatan Ile Boleng			1.884.025.399		1.892.657.017
7-1	0-0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		1.613.742.173		1.593.805.315
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		1.613.742.173		1.593.805.315
y						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)				
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)				
7-1	0-0	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)		65.000.000		65.000.000
7-1	0-0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dok)	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
7-1	0-0	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2 dok	7.500.000	2 dok	7.500.000
7-1	0-0	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (lap)		30.000.000		30.000.000
7-1	0-0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lanoran Evaluasi Kineria Peranakat Daerah	5 dok	17.500.000	5 dok	17.500.000
7-1	0-0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.232.196.020		1.232.196.020
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	17 orang	1.198.136.020	17 orang	1.198.136.020

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.7 dari 18

		KODI	S.,,				Targe	t Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2025		2026
ķ.,				SU			Target	Rp	Target	Rp
		1		11-11-11	2	3	9	10	11	12
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 dok	24.060.000	4 dok	24.060.000
7-1	0-0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (lap)	5Lap.	10.000.000	5 Lap.	10.000.000
7-1	0-0	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000		5.000.000
7-1	0-0	01	2.03	05	1	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan lapporan barang milik daerah pada SKPD (lap)	2 Lap.	5.000.000	2 Lap.	5.000.000
7-1	0-0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7-1	0-0	01	2.05	09	dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)				
7-1	0-0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		133.700.000	-	133.700.000
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000
7-1	0-0	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka (paket)	10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.8 dari 18

		KODI	•				Target	Kinerja Program	dan Kerangi	ca Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2025		2026
				S			Target	Rp	Target	Rp 12
7-1	0-0	01	2.06	05	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	9 1 paket	10.800.000	11 1 paket	10.800.000
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang-Undangan	jumlah dokumen hahan hacaan dan peraturan	12 Dok.	900.000	12 Dok.	900.000
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.000.000
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)	12 Lap.	50.000.000	12 Lap.	50.000.000
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah			76.045.556		56.108.698
7-1	0-0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan	jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (unit)	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000
7-1	0-0	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	2 paket	22.645.723	2 paket	20.000.000
7-1	0-0	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				
7-1	0-0	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor /bangunan lainya	jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3 Unit	28.399.833	3 Unit	11.108.698
7-1	0-0	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pedukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)		78.800.597		78.800.597

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.9 dari 18

		KODI	E				Targe	et Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2025		2026
		1		· ·	2	3	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12
7-1	0-0	01	2.08	01			12 Lap.	1.600.000		1.600.000
7-1	0-0	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (lap)	4 Lap.	10.000.597	4 Lap.	10.000.597
7-1	0-0	01	2.08	04	Danyadiaan Jaca Dalayanan Umum	jumlah langran penyedigan jasa pelayanan umum	12 Lap	67.200.000	12 Lap	67.200.000
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)		23.000.000		23.000.000
7-1	0-0	01	2.09	02	i Kendaraan ijinas ijnerasionai atali	jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	8 Unit	5.000.000	8 Unit	5.000.000
7-1	0-0	01	2.09	06	Pemeliharaan neralatan dan mesin	jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)				
7-1	0-0	01	2.09	08	pemelihraan aset tak berwujud	jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)				
7-1	0-0	01	2.09	09		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	13.000.000	1 unit	13.000.000
7-1	0-0	01	2.09	10	Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit		1 unit	
7-1	0-0	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
7	01				Kecamatan			270.283.226		298.851.702
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		65.301.208		88.061.522

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.10 dari 18

		KODI	3				Targe	et Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2025		2026
		-	*	SUI			Target	Rp	Target	Rp
-		1			2	3	9	10	11	12
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan				
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	4 Dok.	65.301.208	4 Dok.	88.061.522
7	01	03			Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi /%		15.699.419		15.369.015
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)	12 Dok	15.699.419	12 Dok	15.369.015
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%				
7	01	05	2.01		Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			91.115.235		92.169.519
7	01	05	2.01		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (laporan)	12 Dok.	91.115.235	12 Dok.	92.169.519
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)				
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			98.167.364		103.251.646

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.11 dari 18

		ŀ	KODE					Targe	et Kinerja Program	dan Keran	gka Pendanaan
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRÒGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		2025		2026
			-		S			Target	Rp	Target	Rp
			1		-	. 2	3	9	10	11	12
7	0	1	06	2.01	01	Faslitasi Penyusunanan peraturan desa dan peratuaran kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	10 Dok.	25.000.000	10 Dok	30.000.000
7	0	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	21 Dok	25.000.000	21 Dok	30.000.000
7	0	1	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan	3 Dok.	18.167.364		
7	0	1	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1 Dok	30.000.000	1 Dok	43.251.646

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.12 dari 18

		KOD	E				Kone	lisi Kinerja pada		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	GIATAN akhir periode Renstra Perangkat Daera		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				SU			Target	Rp	1	
		1			2	3	13	14	14	15
7-1		0-0	100					# 0#0 0/0 400		
7-1	0-0	- 5		12.3	Kecamatan Ile Boleng			7.378.262.193		
7-1	0-0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		6.334.538.917		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				
y					* 15 Add Sec. 17 Control of the Control	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)				
			- 13		n in a firm we fightly flower your time.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)				
7-1	0-0	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)		140.000.000		
7-1	0-0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dok)		40.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)		30.000.000	Kancam lle Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (lap)				
7-1	0-0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)		70.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.928.784.080		
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		4.792.544.080	Kancam Ile Boleng	Senadan

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.13 dari 18

		KODI					Kond	lisi Kinerja pada	Unit Kerja	
URUSAN	BIDANG	BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		periode Renstra angkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
		7.		SU		Provide and the second	Target	Rp 14	14	15
		1			2	3	13	14	14	
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		96.240.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (lap)		40.000.000		
7-1	0-0	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000		
7-1	0-0	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan lapporan barang milik daerah pada SKPD (lap)		20.000.000		
7-1	0-0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		
7-1	0-0	01	2.05	09	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)				
7-1	0-0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	534.800.000		
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)		20.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)		80.000.000		
7-1	0-0	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka (paket)		80.000.000		
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)		48.000.000	Kancam lle Boleng	Senadan

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.14 dari 18

		KODI					Kondi	isi Kinerja pada	Unit Kerja	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	사용하다 나는 사람들이 살아보다 하는데 하는데 어느를 가는데 나는데 나를 하는데 그렇게 되었다. 그렇게 되었다면 하는데 그렇게 되었다면 하는데 그렇게 되었다.				Lokasi
		-	-	SO			Target	Rp		
		1			2	3	13	14	14	15
7-1	0-0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)		43.200.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undngan yang disediakan (dok)		3.600.000		
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah lap fasilitasi kunjungan tamu (lap)		60.000.000		
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)		200.000.000		
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah			303.752.449		
7-1	0-0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan	jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (unit)		100.000.000		
7-1	0-0	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	8 Paket	82.645.723		
7-1	0-0	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				
7-1	0-0	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)	2 Unit	30.000.000		
7-1	0-0	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor /bangunan lainya	jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)	12 Unit	91.106.726		
7-1	0-0	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pedukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)				
7-1	0-0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)		315.202.388		

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.15 dari 18

		KOD	E				Kond	isi Kinerja pada	Unit Kerja	
URUSAN	URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	akhir	periode Renstra angkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		А	×	SUE			Target	Rp		
-		1			2	3	13	14	14	15
7-1	0-0	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Junin laporan ponjoular jaca car at major (17)	48 Lap.	6.400.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	air dan listrik yang disediakan (lap)	16 Lap.	40.002.388	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	timber language partial age palayanan umum	48 Lap.	268.800.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)		92.000.000		
7-1	0-0	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)		20.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		-		
7-1	0-0	01	2.09	08	pemelihraan aset tak berwujud	jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)				
7-1	0-0	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		52.000.000	Kancam lle Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)			Kancam Ile Boleng	Senadan
7-1	0-0	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		20.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan
7	01				Kecamatan			1.043.723.276		
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		286.578.908		

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.16 dari 18

		KOD	Е							
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	akhir	si Kinerja pada periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
	11			S			Target Rp		1	
_		_1_	-		2	3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13	13 14	14	15
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan		•		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)		286.578.908	Kancam Ile Boleng	Senadan
7	01	03			Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi /%		61.040.075		
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			***		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)	12 Dok	61.040.075	Kancam lle Boleng	Senadan
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%		-		
7	01	05	2.01		Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			330.271.478		
7	01	05	2.01		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (laporan)	12 Dok.	330.271.478	Kancam Ile Boleng	Senadan
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)				
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)		-		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		- 1	365.832.815		

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.17 dari 18

URUSAN	_		PROGRAM ON THE PROGRAM NATIONAL PROGRAM		3 KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	akhii	disi Kinerja pada r periode Renstra rangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					- ×						SUB		
	1. 1. 1.		1	AR Age		2	3	13	14	14	15		
7	01	. (06	2.01	01	Faslitasi Penyusunanan peraturan desa dan peratuaran kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	10 Dok.	95.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan		
7	01	. (06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	21 Dok	95.000.000	Kancam Ile Boleng	Senadan		
7	01		06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)	2 Dok	42.114.727	Kancam Ile Boleng	Senadan		
7	01	. (06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1 Dok	133.718.088	Kancam Ile Boleng	Senadan		

Tabel 6.1 Renstra lle Boleng hal.18 dari 18

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026. Kecamatan Ile Boleng sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi; dalam urusan perencanaan dan penelitian, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No		in the second		Kondisi Kinerja pada				
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	TARUN 2023 TARGET	Target dan Capaian TAHUN 2024 TARGET	TAHUN 2025 TARGET	TAHUN 2026 TARGET	akhir periode RPD	
1_	2	3	1	5		1	9	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							
1.1	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	98,21	100	100	100	100	100	
1.2	Cakupan Vaksinasi (%)	100	100	100	100	100	100	
1.3	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		100	100	100	100	100	
1.4	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	6	100	100	100	100	100	

Halaman 52

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dukumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Ile Boleng merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ile Boleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kecamatan Ile Boleng sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Ile Boleng setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Ile Boleng yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Akhir kata semoga Renstra Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Kecamatan Ile Boleng.

Senadan, Februari 2022

Camat He Boleng,

UMAR RAYA DAEN, S. IP Pembina

ILE BOLENG

NIP.196406221988031012

Hal.53